

TESIS
AKTA NOTARIS TENTANG KESEPAKATAN
PERDAMAIAN DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PENYELESAIAN
SENKETA



Diajukan Oleh
YUDA IRWAN SETYA
2420216310082

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN

Maret 2026

**AKTA NOTARIS TENTANG KESEPAKATAN PERDAMAIAN
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENYELESAIAN
SENKETA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

**Yuda Irwan Setya
2420216310082**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Maret 2026

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
dihadapan sidang panitia penguji Pada

Tanggal.....

PEMBIMBING



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui Oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
NIP.19780502200 11222 2 0

Tesis ini telah di pertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
Pada Tanggal 30 Juni 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Hj. Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota	: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuda Irwan Setya

NIM : 2420216310082

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Akta Notaris Tentang Kesepakatan Perdamaian Ditinjau
Dalam Perspektif Hukum Penyelesaian Sengketa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2026

Yang membuat pernyataan



Yuda Irwan Setya

2420216310082



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

YUDA IRWAN SETYA

NIM. 2420216310082

MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Judul Tesis :

**AKTA NOTARIS TENTANG KESEPAKATAN PERDAMAIAN DITINJAU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 20%
sesuai dengan kriteria teloransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 27 Agustus 2026



Mengetahui,
Dekan
Bidang Akademik

D/ H Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

AKTA NOTARIS TENTANG KESEPAKATAN PERDAMAIAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

**Oleh: Yuda Irwan Setya¹, Rahmida Erliyani²
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 113 Halaman**

RINGKASAN

Di banyak daerah, termasuk yang terjadi dalam praktik kenotariatan, kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa kerap dituangkan dalam akta notaris tanpa melalui penetapan hakim, padahal jalur ini seharusnya melewati mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akta perdamaian jenis ini memang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik dan mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, tetapi tidak serta-merta memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dalam UUD, HIR, dan RBG dengan kebutuhan praktik penyelesaian sengketa yang cepat dan pasti, sekaligus menunjukkan adanya kekaburan norma terkait batas kewenangan notaris dalam membuat akta perdamaian di luar persidangan. Persoalan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi notaris selaku pejabat umum, maupun bagi para pihak yang menaruh harapan pada kekuatan mengikat akta tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan akta perdamaian ditinjau dari hukum penyelesaian sengketa, serta mengkaji kekuatan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum kenotariatan dan hukum acara perdata, khususnya dalam memperjelas batas kewenangan notaris dan kedudukan akta perdamaian sebagai instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan bagi notaris, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan penguatan regulasi terkait akta perdamaian notariil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dipakai terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum dan argumentasi yuridis untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan akta perdamaian bersifat atributif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana notaris berperan sebagai fasilitator yang memberi bentuk hukum atas kesepakatan para pihak, bukan sebagai adjudicator seperti hakim. Kewenangan ini bersifat komplementer terhadap sistem peradilan dan hanya berlaku dalam ranah hukum perdata privat, tidak mencakup sengketa yang menjadi kewenangan eksklusif pengadilan atau menyangkut kepentingan publik. Adapun dari sisi kekuatan hukumnya, akta perdamaian notariil memberikan kekuatan pembuktian sempurna, baik dari aspek lahiriah, formal, maupun material, serta mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda. Namun, kekuatan tersebut terbatas pada aspek eksekutorial, sebab akta perdamaian tidak otomatis memiliki titel eksekutorial seperti putusan pengadilan, sehingga pelaksanaannya bergantung pada itikad baik para pihak dan, apabila terjadi wanprestasi, tetap memerlukan upaya hukum melalui pengadilan.

AKTA NOTARIS TENTANG KESEPAKATAN PERDAMAIAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

**Oleh: Yuda Irwan Setya¹, Rahmida Erliyani²
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 113 Halaman**

ABSTRAK

Kata Kunci: Akta Perdamaian, Kewenangan Notaris, Kekuatan Hukum, Kekuatan Eksekutorial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta perdamaian ditinjau dari hukum penyelesaian sengketa, serta mengkaji kekuatan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum.

Hasil penelitian rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan akta perdamaian bersifat atributif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana notaris berfungsi sebagai fasilitator yang memberi bentuk hukum terhadap kesepakatan damai para pihak, bukan sebagai pemutus perkara. Kewenangan ini bersifat komplementer terhadap lembaga peradilan dan hanya berlaku dalam lingkup hukum perdata privat. Hasil penelitian rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan kekuatan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, tetapi tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung. Pelaksanaan isi akta bergantung pada itikad baik para pihak, dan bila terjadi wanprestasi, penyelesaiannya tetap harus ditempuh melalui jalur pengadilan.

,

NOTARIAL DEED ON DEED OF SETTLEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF DISPUTE RESOLUTION LAW

By
Yuda Irwan Setya¹, Rahmida Erliyani²
Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, 113 pages

ABSTRACT

Keywords: *Deed of Settlement, Notary's Authority, Legal Force, Executorial Power*

This study is aimed at analyzing the Notary's authority in the making of deed of settlement perceived from Dispute Resolution Law, and analyzing the legal force of deed of settlement made before the Notary. This is normative legal research with the character of prescriptive-analytical, using statute, conceptual, and case approaches. The primary, secondary, and tertiary legal resources are collected through library study and analyzed qualitatively by utilizing legal interpretation technique. The findings of the research for the first issue indicate that the Notary's authority in the making of deed of settlement is attributive in nature based on Notary Office Act in which the Notary functions a facilitator who provides legal form upon the settlement of the parties, not as case decision making. This authority is complimentary to the judiciary institution and it is only valid in the area of private civil law. The findings of the research for the second issue indicate that deed of settlement made before the Notary possesses full evidentiary power and binding force based on the principle of *facta sunt servanda*, but it does not have direct executorial power. The execution of the content of the deed of settlement depends on good faith of the parties, and in the event of breach of contract, its settlement must be pursued through the litigation channel.

Certified by,



¹ Student number: 2420216310082

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling bermakna dalam naskah karya ilmiah ini selain lembar persembahan yang memuat ungkapan syukur, hormat, dan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat selama proses penyusunan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa** atas segala kasih karunia, penyertaan, hikmat, kekuatan, dan pertolongan-Nya yang senantiasa menuntun setiap langkah perjalanan hidup serta proses penyelesaian studi ini.
2. **Kedua orang tua tercinta**, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, nasihat, serta dukungan moral maupun spiritual dalam setiap perjalanan hidup saya. Terima kasih atas pengorbanan, ketulusan, dan cinta yang tidak terhingga.
3. **Pasangan saya tercinta**, yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan kesabaran dalam setiap proses perjuangan akademik ini.
4. **Saudara-saudara saya**, yang selalu menjadi tempat berbagi semangat, memberikan dukungan, kesabaran, serta motivasi dalam menghadapi berbagai tantangan selama perjalanan studi ini.
5. **Pimpinan dan rekan kerja**, yang telah memberikan dukungan, kesempatan, serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
6. **Almamater tercinta**, yang telah menjadi tempat menimba ilmu, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga dalam membentuk perjalanan intelektual dan pribadi saya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul “Akta Notaris Tentang Kesepakatan Perdamaian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Penyelesaian Sengketa”. Penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada **Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan.**

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL. M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Sebagai Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini;
5. Seluruh Dosen pengasuh mata kuliah Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung**

Mangkurat Banjarmasin, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan;

7. **Kedua orang tua penulis yang tercinta**, keluarga dan sahabat yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan dan perjalanan akademik.

Banjarmasin, Maret 2026

Yuda Irwan Setya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	21
BAB II KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERDAMAIAN DI TINJAU BERDASARKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA	26
A. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Perdamaian Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris	26
B. Kedudukan Akta Perdamaian dalam Sistem Hukum Penyelesaian Sengketa	38
C. Batasan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perdamaian	49
BAB III KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS	61
A. Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian sebagai Akta Autentik	61
B. Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda	70

C. Kekuatan Eksekutorial dan Batasan Akta Perdamaian Notariil	79
BAB IV PENUTUP	89
A. Simpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	